

PERKEMBANGAN KRISIS MYANMAR PASCA-ASEAN LEADERS' MEETING

7

Lisbet

Abstrak

Kepemimpinan militer Myanmar bertanggung jawab terhadap krisis yang masih terjadi di Myanmar. Padahal, konsensus telah dicapai di tingkat ASEAN dalam upaya mengatasi krisis tersebut, yang termuat dalam lima butir kesepakatan yang dicapai melalui ASEAN Leaders' Meeting di Jakarta, 24 April 2021. Muncul pandangan tentang perlunya dukungan internasional untuk mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar. Tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk dukungan internasional dalam mengatasi krisis Myanmar. Untuk mencari solusi damai atas krisis Myanmar, para pejabat ASEAN telah melakukan pertemuan dengan pemimpin militer Myanmar, namun upaya tersebut tidak memberikan hasil. Hal ini memperkuat alasan perlunya dukungan internasional untuk mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar. Negara-negara yang menyatakan dukungannya antara lain Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada. Selain itu, dukungan juga datang dari Uni Eropa dan PBB. Bentuk dukungan internasional yang diberikan tidak hanya bersifat verbal berupa kecaman, namun juga dengan pemberian sanksi kepada Pemerintah Myanmar jika kekerasan masih terjadi.

Pendahuluan

Masyarakat internasional merasakan kekhawatiran terhadap krisis yang terjadi di Myanmar karena masih belum adanya mekanisme yang dapat memastikan agar Pemerintah Militer Myanmar mematuhi isi kelima butir konsensus ASEAN. Kelima butir konsensus ASEAN disepakati bersama pada saat ASEAN Leader's Meeting tanggal 24 April 2021 di Jakarta. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN telah melakukan upaya untuk membujuk Pemerintah Militer Myanmar agar mau melakukan dialog dan menghentikan kekerasan

terhadap masyarakat sipil di Myanmar.

Adapun kelima butir konsensus ASEAN adalah sebagai berikut: Pertama, segera menghentikan kekerasan dan semua pihak harus menahan diri; Kedua, memulai dialog konstruktif di antara semua pihak terkait guna mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat; Ketiga, Utusan Khusus dari Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi dengan dibantu Sekretaris Jenderal ASEAN; Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan



Kemanusiaan pada Penanggulangan Krisis; Kelima, Utusan Khusus dan Delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Isu ini penting karena krisis yang terjadi di Myanmar merupakan pelanggaran HAM dan jika dibiarkan akan mengganggu stabilitas keamanan di kawasan ASEAN. Semakin meningkatnya jumlah korban tewas dan terluka dari kekerasan militer maka akan semakin bertambah juga jumlah pengungsi yang mengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar (termasuk Indonesia).

Krisis Myanmar telah menjadi perhatian para Pejabat ASEAN. Untuk mengatasi hal tersebut, Sekretaris Jenderal ASEAN dan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN telah melakukan pertemuan dengan pemimpin militer Myanmar. Sayangnya, upaya yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi, dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Kedua Brunei Darussalam, Erywan Pehin Yusof, untuk bertemu dengan pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, tidak memberikan hasil yang maksimal, karena minimnya transparansi untuk konsultasi dengan negara anggota ASEAN lainnya.

Meskipun sejak tahun 2015 ASEAN sudah menjadi Komunitas Politik, namun Pemerintah Myanmar masih kurang menghormati ASEAN. Masih kurangnya komunikasi yang transparan di antara anggota ASEAN dan masih belum terpilihnya utusan khusus ASEAN telah menjadi kendala bagi ASEAN untuk mengatasi krisis ini. Oleh karena itu, ASEAN memerlukan dukungan internasional. Adapun permasalahan yang dianalisis adalah bagaimana bentuk dukungan

internasional dalam mengatasi krisis HAM di Myanmar.

Perkembangan Krisis HAM Myanmar

Kekerasan meningkat di beberapa negara bagian Myanmar seperti Negara Bagian Kayah, Negara Bagian Chin dan Negara Bagian Kachin. Kekerasan terjadi di wilayah dengan kelompok etnis dan agama minoritas yang signifikan. Pasukan militer telah menembaki rumah dan gereja masyarakat sipil serta memblokir akses kemanusiaan termasuk dengan menyerang pekerja bantuan.

Di Negara Bagian Kayah, gelombang pengungsi semakin bertambah. Sejak militer melakukan kudeta pada tanggal 1 Februari 2021, sudah sebanyak 108 ribu orang mengungsi karena pemukiman mereka diserbu aparat pendukung Pemerintah Militer Myanmar (Kompas, 12 Juni 2021).

Negara bagian Kayah merupakan negara bagian yang wilayahnya berbatasan dengan Thailand. Wilayah ini merupakan salah satu dari beberapa wilayah di mana relawan Pasukan Pertahanan Rakyat bentrok dengan tentara militer Myanmar yang memiliki persenjataan lengkap. Tentara militer merespons perlawanan para relawan di wilayah ini dengan artileri dan serangan udara. Oleh karena itu, masyarakat sipil melarikan diri dari rumahnya ke hutan terdekat dengan membawa sedikit air dan makanan, atau bahkan tidak sama sekali.

Konflik bersenjata kembali terjadi antara Pemerintah Militer Myanmar dengan kelompok bersenjata Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay Myanmar di Chan Mya

Tharsi, Mandalay (yang merupakan kota terbesar kedua di Myanmar) pada tanggal 22 Juni 2021, yang mengakibatkan empat masyarakat sipil tewas. Konflik ini merupakan serangan balasan dari kelompok bersenjata karena sebelumnya pasukan militer telah terlebih dulu menggempur salah satu markas gerilyanya. Akibat dari konflik ini, puluhan ribu warga sekitar terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Sejak terjadinya kudeta militer pada tanggal 1 Februari 2021, telah banyak bermunculan kelompok-kelompok bersenjata di sejumlah daerah perkotaan maupun perdesaan di Myanmar. Kendati demikian, kekuatan kedua belah pihak tidak seimbang. Dalam menghadapi kelompok bersenjata, pasukan militer kerap menggunakan kendaraan artileri di darat dan serangan udara. Sementara kelompok bersenjata, hanya menggunakan senjata rakitan dan granat. Menurut data kelompok aktivis, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sedikitnya 873 orang pengunjung rasa yang telah tewas sejak tanggal 1 Februari 2021 (Kompas 23 Juni 2021).

Selain itu, Pemerintah Militer Myanmar telah menangkap lebih dari 4 ribu orang tenaga kesehatan dan masih memburu ribuan orang tenaga kesehatan lainnya karena menentang kudeta (Kompas, 3 Juni 2021). Para tenaga kesehatan terpaksa bersembunyi dan tidak bekerja meskipun keahliannya sedang dibutuhkan untuk merawat pasien Covid-19 atau merawat korban kekerasan Pemerintah Militer Myanmar. Akibatnya, sistem layanan kesehatan di Myanmar menjadi tidak berjalan.

Upaya ASEAN dan Dukungan Internasional

Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia telah menawarkan solusi damai di internal ASEAN terlebih dulu. Secara internal, Indonesia meminta Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar dapat merumuskan kerangka acuan secara transparan untuk menunjuk utusan khusus, termasuk pemilihan kandidat utusan khusus. Utusan khusus (*special envoy*) nantinya akan berperan untuk memfasilitasi mediasi antara ASEAN dan Pemerintah Myanmar. Peran utusan khusus nantinya akan sangat strategis karena mendapatkan akses untuk dapat berbicara kepada semua pihak, termasuk faksi-faksi yang ada di Myanmar. Oleh karena itu, dalam pemilihannya, Ketua ASEAN perlu berkonsultasi dengan semua pihak dan dilakukan secara transparan agar kesatuan ASEAN dapat terus terjaga.

Upaya internal lain yang dapat dilakukan ASEAN adalah mendekati dan mendorong Kamboja sebagai Ketua ASEAN berikutnya agar memulai perannya dalam mengatasi krisis di Myanmar. Meskipun demikian, apabila upaya mencari solusi damai di dalam internal ASEAN tidak mendapatkan respons positif maka ASEAN perlu menekankan solusi damai di eksternal ASEAN.

Untuk solusi damai di eksternal ASEAN, ASEAN dapat mengambil langkah seperti *coalition of the willing*. Pada langkah ini, Indonesia dapat mengajak beberapa negara anggota ASEAN yang peduli dengan kondisi Myanmar seperti Malaysia dan Singapura, ditambah negara mitra dialog ASEAN seperti Jepang, Australia, dan Amerika Serikat untuk

memberikan dukungannya.

Jepang memberikan dukungannya kepada ASEAN untuk segera mewujudkan kelima butir konsensus ASEAN. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi telah menyatakan bahwa penerapan konsensus ASEAN sangat penting untuk mengatasi krisis Myanmar.

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Wendy Sherman pun mendukung ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar. ASEAN dinilai paling cocok untuk mengatasi krisis tersebut. Sentralitas ASEAN dianggap dapat berkontribusi terhadap upaya dialog dan solusi bagi masyarakat Myanmar. Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar harus menjadi prioritas. Amerika Serikat, Inggris dan Kanada merupakan negara anggota G-7 yang sudah menerapkan serangkaian sanksi bagi Myanmar.

Selain keempat negara tersebut, organisasi internasional seperti Uni Eropa (UE) dan PBB pun telah memberikan dukungannya kepada ASEAN. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell menyatakan kecamannya terhadap kudeta dan semua upaya Pemerintah Militer Myanmar sejak tanggal 1 Februari 2021. Bahkan, Uni Eropa tidak mau mengakui pemerintahan hasil kudeta dan tidak akan menerima pembubaran Liga Nasional untuk Demokrasi (LND). Uni Eropa pun akan terus mengancam semua upaya yang dilakukan Pemerintah Militer Myanmar untuk membalikkan keinginan masyarakat Myanmar dan mengubah hasil pemilu terakhir. Tidak ada represi ataupun proses hukum palsu yang bisa mengesahkan pengambilan kekuasaan ilegal oleh Pemerintah Militer Myanmar.

Uni Eropa juga telah menjatuhkan sejumlah sanksi kepada 43 pejabat senior dan 6 organisasi di Myanmar pada tanggal 21 Juni 2021 (Kompas 23 Juni 2021). Uni Eropa telah memberlakukan larangan bepergian dan pembekuan aset delapan menteri, wakil menteri, dan jaksa agung Myanmar. Selain itu, Uni Eropa juga telah membekukan aset tiga 'entitas ekonomi' seperti sektor kayu dan batu permata milik pemerintah yang dikendalikan oleh Junta Militer dan Organisasi Veteran Perang. Dengan adanya sanksi ini, maka kemampuan Junta Militer dalam mengambil keuntungan dari sumber daya alam di Myanmar akan menjadi terbatas. Dengan demikian, nantinya Pemerintah Militer Myanmar tidak akan memperoleh pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi, penjualan batu akik, batu giok, kayu dan aneka hasil alam lainnya.

Dukungan internasional lainnya juga diberikan oleh PBB. Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet menunjukkan kekecewaannya atas sikap Pemerintah Militer Myanmar yang belum mengimplementasikan lima butir konsensus ASEAN. Sebagai bentuk dukungan dalam mengatasi krisis Myanmar, Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Juni 2021 telah mengeluarkan sebuah resolusi. Ada 119 negara yang menyetujui resolusi tersebut, 36 negara yang abstain, dan 1 negara yang menentangnya yakni Belarusia. Belarusia menentang resolusi ini karena negara ini merupakan pemasok senjata utama ke Myanmar.

Isi dari resolusi PBB tersebut antara lain mengutuk penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar, meminta

Pemerintah Militer Myanmar untuk memulihkan transisi demokrasi di Myanmar, dan menahan diri dari kekerasan. Pada resolusi tersebut, PBB juga mendesak Pemerintah Militer Myanmar untuk menghormati hasil pemilu dan segera membebaskan tanpa syarat para tahanan politik, seperti Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan pejabat lainnya. Resolusi PBB tersebut mendapatkan pujian dari masyarakat internasional karena resolusi ini mencerminkan konsensus internasional yang menyatakan kecaman Majelis Umum PBB dalam menghadapi pelanggaran berat terhadap norma-norma demokrasi fundamental dan mengabaikan keinginan yang diungkapkan dengan jelas dari masyarakat internasional.

Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun mendukung resolusi PBB tersebut. Kyaw Moe Tun juga mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan kolektif yang efektif agar dapat mengakhiri krisis Myanmar. Kurangnya tindakan kolektif yang efektif dari masyarakat internasional semakin mendorong militer untuk terus melakukan tindakan tidak manusiawi dan brutal terhadap masyarakat sipil dan akan mengakibatkan hilangnya lebih banyak nyawa masyarakat sipil. Akan tetapi desakan PBB ini tidak diindahkan oleh Pemerintah Militer Myanmar. Pada tanggal 19 Juni 2021, Pemerintah Militer Myanmar melalui Kementerian Luar Negerinya telah merilis pernyataan yang menolak Resolusi PBB tersebut dengan menyebutkan bahwa tuduhan PBB tersebut berdasarkan pada asumsi yang salah dan tuduhan sepihak.

Pada pernyataan tersebut, Pemerintah Militer Myanmar juga

mempertanyakan legitimasi Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun yang telah berbicara atas nama pemerintah sipil terpilih di negara itu. Pernyataan, partisipasi, dan tindakan Kyaw Moe Tun dalam pertemuan di PBB dianggap tidak sah dan tidak dapat diterima karena telah diberhentikan dari posisinya dan telah didakwa dengan pengkhianatan di Myanmar.

Penutup

Masih belum adanya mekanisme dalam mengimplementasikan kelima butir konsensus ASEAN dan belum terpilihnya utusan khusus ASEAN merupakan penyebab ASEAN belum dapat mengatasi krisis Myanmar. Padahal utusan khusus ASEAN memiliki peran strategis untuk dapat berkomunikasi dengan semua pihak. Karena ASEAN masih belum dapat mengatasi krisis Myanmar secara internal, maka diperlukan dukungan dari masyarakat internasional. Masyarakat internasional mendukung ASEAN untuk mengatasi krisis Myanmar karena tidak menerima kudeta dan tidak akan mengakui legitimasi rezim yang berasal dari kudeta tersebut. Jika krisis ini tidak segera diatasi, maka stabilitas keamanan di kawasan ASEAN akan menjadi semakin terganggu. Dukungan masyarakat internasional baik yang bersifat verbal seperti seruan maupun kecaman telah diberikan berikutan dengan tindakan pemberian sanksi oleh sejumlah negara maupun organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa terhadap Pemerintah Militer Myanmar.

Referensi

“ASEAN Faces Fresh Wave of Forced Migration Amid Myanmar

- Crisis", *The Jakarta Post*, 12 Juni 2021, hal. 2.
- "Bachelet Dorong Dunia Satukan Tuntutan", *Kompas*, 12 Juni 2021, hal. 4.
- "Kapal Tenggelam ASEAN dan Pilihan Indonesia", *Kompas*, 14 Juni 2021, hal. 6.
- "Konflik Bersenjata Tak Berujung", *Kompas*, 23 Juni 2021, hal. 4.
- "Krisis Kemanusiaan di Myanmar Kian Parah", *Kompas*, 10 Juni 2021, hal. 4.
- "Menjaga Marwah ASEAN", *Kompas*, 14 Juni 2021, hal. 4.
- "Menlu Retno Tekankan Penunjukan Utusan Khusus", *Media Indonesia*, 8 Juni 2021, hal. 14.
- "Myanmar Tolak Embargo Senjata PBB", *Republika*, 21 Juni 2021, hal. 13.
- "Pemimpin Junta Myanmar Hadiri Konferensi Keamanan", *Media Indonesia*, 22 Juni 2021, hal. 13.
- "Pimpinan Junta Myanmar Hadiri Konferensi di Moskow", *Republika*, 22 Juni 2021, hal. 4.
- "Perlawanan Warga Myanmar Kian Sengit", *Kompas*, 6 Juni 2021, hal. 15.
- "RI Mendesak ASEAN untuk Bertindak", *Kompas*, 3 Juni 2021, hal. 4.



Lisbet
lisbet@dpr.go.id

Lisbet, SIP., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Nasional pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia" (2014), "Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo di Bidang Pariwisata" (2015), dan "Pengelolaan Keamanan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Pada Era Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.